

**SIKAP PIMPINAN GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS TERHADAP  
ANGGOTA JEMAAT YANG MENJADI ANGGOTA TNI**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana**

**Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar**

**Magister Filsafat Keilahian**



**OLEH:**

**WENDY KRISTIAN**

**50180045**

**YOGYAKARTA**

**Desember 2020**

**SIKAP PIMPINAN GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS TERHADAP  
ANGGOTA JEMAAT YANG MENJADI ANGGOTA TNI**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana**

**Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar**

**Magister Filsafat Keilahian**



**OLEH:**

**WENDY KRISTIAN**

**50180045**

**YOGYAKARTA**

**Desember 2020**

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wendy Kristian  
NIM : 50180045  
Program studi : Master of Theology (M.Th), Ilmu Teologi  
Fakultas : Teologi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **“SIKAP PIMPINAN GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS TERHADAP ANGGOTA JEMAAT YANG MENJADI ANGGOTA TNI”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

Yang menyatakan



(Wendy Kristian)  
NIM. 50180045

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul :  
**Sikap Pimpinan Gereja Kalimantan Evangelis Terhadap  
Anggota Jemaat Yang Menjadi Anggota TNI**

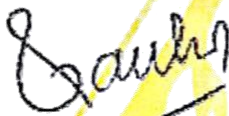
Telah diajukan dan dipertahankan  
oleh:

**Weedy Kristian**  
(NIM: 50180045)

Dalam Ujian Tesis Program Studi Magister Filsafat Keilahan  
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana  
Pada tanggal 5 Januari 2021 dan dinyatakan LULUS.

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

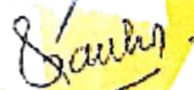


Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D.

Pdt. Dr. Jozef M. N. Hehanussa, M.Th


Dosen Penguji :

1. Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D
2. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D.
3. Pdt. Dr. Jozef M. N. Hehanussa, M.Th



Disahkan oleh :



  
Joko Prasetyo Adi Wibowo, Th.M  
Kaprodi Magister Filsafat Keilahan

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wendy Kristian

NIM : 50180045

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

### **SIKAP PIMPINAN GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS TERHADAP ANGGOTA JEMAAT YANG MENJADI ANGGOTA TNI**

Adalah karya saya sendiri dan bahwa catatan informasi yang saya pergunakan sesuai makna aslinya. Apabila kelak dikemudian hari bahwa karya tulis ini merupakan salinan karya ditulis dari orang lain, saya bersedia melepaskan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Januari 2020



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“SIKAP PIMPINAN GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS TERHADAP ANGGOTA JEMAAT YANG MENJADI ANGGOTA TNI”** tepat pada waktunya. Tesis ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan studi program Magister di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan doa dan motivasi yang sangat besar sejak awal penulisan hingga terwujudnya tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo, Th.M, Kaprodi Magister Filsafat Keilahan.
2. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D., dosen pembimbing satu dalam penulisan tesis ini, yang membimbing sampai selesainya penulisan tesis ini.
3. Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, M.Th, sebagai pembimbing dua yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
4. Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D, sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan untuk menyempurnakan penulisan tesis ini.
5. Orangtua tercinta Weben Brahim dan Supriani, yang selalu berdoa, memotivasi, dan mendukung, serta membiayai penulis selama mengikuti pendidikan di UKDW.
6. Saudaraku Eric Nathanael, Kakak Iparku Yuyuh, dan keponakanku Ica Anugrahni, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di UKDW.
7. Maria Veronica, yang selalu berdoa, memotivasi, dan mendukung penulis selama mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan di UKDW.
8. Teman-teman angkatan 2019, yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis selama berproses dalam pendidikan di UKDW.
9. Seluruh dosen yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama penulis menimba ilmu di UKDW.
10. Staf-staf kampus Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta.

11. Ketua Sinode, Pdt. Marko Mahin, dan seluruh Ketua Resort di GKE Barito Timur, yang memberikan dukungan kepada penulis selama melakukan penelitian.

Penyusunan dan pembuatan tesis ini, tidak akan berjalan dan terselesaikan dengan baik, tanpa bantuan serta dorongan motivasi dari semua pihak. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi orang banyak terlebih bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 18 Januari 2020



Penulis

©UKDWW

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. JUDUL TESIS.....	10
D. BATASAN WILAYAH PENELITIAN .....	10
E. TUJUAN PENELITIAN.....	11
F. HIPOTESA .....	11
G. METODOLOGI PENELITIAN .....	11
H. METODE PENULISAN.....	13
I. KERANGKA TEORITIS .....	15
J. SISTEMATIKA PENULISAN .....	22
<b>BAB II. SEJARAH GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS DAN HUBUNGANNYA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA</b> .....	25
A. SEJARAH GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS .....	25
B. HUBUNGAN GKE DAN TNI.....	42
C. KESIMPULAN .....	63
<b>BAB III. LANDASAN TEORITIS</b> .....	65
A. SELEKTIVISME .....	65
B. TEOLOGI CALVIN TENTANG GEREJA DAN NEGARA .....	97
C. PRINSIP BELA NEGARA .....	110
D. KESIMPULAN .....	114
<b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP SIKAP SELEKTIVISME PIMPINANGEREJA KALIMANTAN EVANGELIS (GKE)</b> .....	117
A. ANALISIS SIKAP PIMPINAN GKE TERHADAP TEORI SELEKTIVISME .....	117
B. ANALISIS SIKAP SELEKTIVISME PIMPINAN GKE TERHADAP TEOLOGI CALVIN TENTANG GEREJA DAN NEGARA.....	136
C. ANALISIS SIKAP PIMPINAN GKE TERHADAP PRINSIP BELA NEGARA.....	147
D. KESIMPULAN .....	150



<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	152
A. KESIMPULAN .....	152
B. SARAN	155
C. KRITIK	157
D. REKOMENDASI .....	159
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	160

©UKDWW

## ABSTRAK

Tulisan ini mengangkat judul Sikap Pimpinan Gereja Kalimantan Evangelis Terhadap Anggota Jemaat Yang Menjadi Anggota TNI. Sikap pimpinan gereja yang dilihat di sini ialah bagaimana tanggapan atau respon dari para pendeta GKE terhadap anggota jemaatnya yang menjadi anggota TNI tersebut. Penelitian ini dilakukan karena berprofesi sebagai TNI dan sekaligus sebagai anggota jemaat suatu gereja adalah hal yang seringkali dipertanyakan, mengingat TNI dalam pekerjaannya tentu menggunakan “kekerasan” untuk bertindak melawan kejahatan, serta TNI juga melakukan perang jika situasi mewajibkan untuk berperang. Oleh sebab itu, TNI dalam pekerjaannya dalam kacamata “awam” menjadi hal yang dipertanyakan, karena secara umum Kekristenan dilihat mengikuti jalan pacifisme (tidak suka kekerasan).

Penelitian ini menggunakan tiga teori yang digunakan untuk menganalisis hasil dari penelitiannya. Teori-teori tersebut adalah teori selektivisme, teologi Calvin tentang gereja dan negara, dan prinsip bela negara, sehingga analisis yang didapat menjadikannya sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaatnya yang menjadi anggota TNI. Hasil dari penelitian mengenai sikap pimpinan GKE adalah GKE dipengaruhi dengan tiga teori tersebut dan dapat disimpulkan bahwa para pemimpin GKE menerima dengan baik anggota jemaat yang menjadi anggota TNI karena dalam profesi dan pekerjaannya mereka tidak melakukan tindakan yang “keras” dengan mudah, tapi hal tersebut sudah diatur oleh pemimpin mereka, pemerintah dan Undang-Undang.

**Kata kunci:** Sikap pimpinan gereja, anggota jemaat, anggota TNI

## ABSTRACH

This paper raises the title of the position of Gereja Kalimantan Evangelis Leaders Toward Its Members Who Join The Indonesian National Army. The position of church leadership seen here is how the response or response of the pastors of GKE to members of their congregations who are members of the TNI. This research was conducted because being the TNI as well as a member of a church congregation is often questioned, considering that the TNI in its work certainly uses "violence" to act against crime, and the TNI also wages war if the situation requires it to fight. For this reason, the TNI in its work in a "lay perspective" is a questionable matter, because in general Christianity is seen as following the path of pacifism (does not like violence). This paper carries the title the paradigm of the Evangelical Kalimantan Church Leaders Toward Members of the Congregation Who are Members of the TNI. The position of church leadership seen here is how the response or response of the pastors of GKE to members of their congregations who are members of the TNI. This research was conducted because being the TNI as well as a member of a church congregation is often questioned, considering that the TNI in its work certainly uses "violence" to act against crime, and the TNI also wages war if the situation requires it to fight. Therefore, the TNI in its work from a "lay perspective" is a questionable matter, because in general Christianity is seen as following the path of pacifism (not liking violence).

This study uses three theories which are used to analyze the results of the research. These theories are the theory of selectivism, Calvin theology about church and state, and the principle of state defense, so that the analysis obtained makes it the position of the GKE leadership towards members of the congregation who are members of the TNI. The results of the research on the position of GKE leaders are that GKE is influenced by these three theories and it can be concluded that GKE leaders welcome church members who are members of the TNI because in their professions and jobs they do not take "hard" actions easily, but this has already been done. governed by their leaders, government and the Act.

**Keywords:** The Position of church leadership, church members, The Indonesian National Army

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Selama gereja berada di dunia ini, anggota-anggota gereja bergumul mengenai keberadaan mereka di tengah-tengah berbagai tantangan yang ada. Hasil pergumulan tersebut menjadi bekal bagi mereka yang bergumul di waktu yang akan datang. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perumusan mengenai pemikiran yang baru mengenai gereja tidak boleh dilakukan, tetapi untuk disadari bahwa dalam mencari eklesiologi baru, gereja tetap harus berdiri dalam tradisi imannya.<sup>1</sup> Pada masa kini pun, gereja masih menghadapi berbagai pergumulan yang ada di dunia ini. Gereja meskipun tidak berasal dari dunia, tapi gereja tidak boleh lengah terhadap permasalahan atau pergumulan yang dihadapi dunia, karena itulah yang seharusnya gereja lakukan yaitu menjadi alat Tuhan (gereja secara non-fisik) untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini.

Pada umumnya, yang dipahami sebagai gereja adalah tempat (secara fisik) beribadah atau berkumpulnya umat Kristen dalam melaksanakan kehidupan spiritualnya kepada Tuhan yang dipercaya. Selain itu, gereja tidak hanya sebagai tempat umat mendengar dan menerima, tetapi juga tempat di mana manusia atau umat menjawab dan memberi. Dengan demikian gereja juga adalah ungkapan iman orang-orang percaya, berupa suatu persekutuan yang dibentuk manusia untuk bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan untuk menyiarkan tentang Injil Yesus Kristus di manapun, dan supaya bangsa Allah di dunia ini semakin besar.<sup>2</sup> Artinya, dalam hal ini, gereja yang berbentuk lembaga atau pun yang berbentuk perkumpulan

---

<sup>1</sup> Jan S. Aritonang, Chr. de Jonge, *Apa dan Bagaimana Gereja? : Pengantar Sejarah Eklesiologi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 3.

<sup>2</sup> Jan S. Aritonang, Chr. de Jonge, *Apa dan Bagaimana Gereja? : Pengantar Sejarah Eklesiologi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 5.

orang percaya yang beribadah, masing-masing memiliki kedudukannya tersendiri di dunia ini untuk perwujudan kehendak Allah.

Eklesiologi masa kini bertitik tolak pada pengertian “umat Allah”, sehingga diperhatikanlah baik dimensi historis maupun dimensi sosial yang ada pada gereja sebagai misteri keselamatan.<sup>3</sup> Pengertian eklesiologis “umat Allah” sebagai titik tolak teologi tentang gereja juga mengungkapkan segi sosial gereja. Segi sosial yang dimaksudkan di sini ialah bahwa sasaran karya keselamatan Allah dan partner perjanjian-Nya adalah manusia secara menyeluruh dan setiap pribadi merupakan anggota umat, dan tidak hanya individu atau perorangan saja. Setiap orang percaya atau yang beriman tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ikut serta dalam iman bersama, yang dihayati dengan mengkomunikasikannya.<sup>4</sup>

Pengkomunikasian iman yang dihayati seperti yang dinyatakan di atas, terwujud juga dalam fenomena sosial yang ada di dalam kehidupan dan atau secara khususnya di dalam ruang lingkup gereja. Sama halnya seperti pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam berbagai profesinya tentu mempengaruhi kehidupan sosialnya. Baik itu kehidupan sosial dengan masyarakat secara umum, maupun khususnya yang berpengaruh dengan kehidupan bergerejanya (kehidupan spiritual). Jika hal tersebut berpengaruh, apakah setiap pekerjaan dalam profesi seseorang selalu dapat diterima sesuai dengan ajaran Kekristenan ataukah tidak? Oleh karena itu, dari pertanyaan semacam inilah hal yang dapat memunculkan berbagai pemahaman maupun perspektif yang memberi jawab maupun kritik mengenai profesi yang berhubungan dengan kehidupan spritiual seseorang.

Kehidupan bergereja yang terkait dengan profesi para anggota jemaat, yang akan dibahas di sini ialah yang mengarah pada pembahasan tentang sikap pimpinan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pimpinan gereja yang dimaksud adalah para petinggi GKE, seperti

---

<sup>3</sup> Nico Syukur Dister, *Teologi Sistematis 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 207.

<sup>4</sup> Nico Syukur Dister, *Teologi Sistematis 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 208.

Ketua Sinode GKE, para ketua resort di kabupaten Barito Timur, dan pendeta lainnya yang tergabung dalam ruang lingkup pelayanan di GKE sebagai narasumber penelitian.

GKE dan TNI diketahui merupakan dua lembaga yang berbeda, yang saling memiliki keterkaitan karena terkait dengan fakta yang ada, anggota jemaat GKE dapat menjadi anggota TNI dan itu telah lama berlangsung. Selama ini yang terjadi, para pimpinan GKE tidak ada mempermasalahkan mengenai anggota jemaat yang menjadi anggota TNI. Oleh sebab itu, apakah profesi sebagai anggota TNI ini sudah sesuai dengan ajaran Kekristenan atau secara khusus sudah sesuaikah dengan ajaran-ajaran Kekristenan di GKE? Hal ini dipertanyakan karena umumnya, para anggota TNI yang menjalankan fungsinya dalam bekerja terkadang dituntut untuk melibatkan unsur “kekerasan” dalam pelaksanaannya.

Kekerasan yang dilakukan para anggota TNI, jika itu sesuai dengan mandat dari atasan tentu itu sudah dilegalkan sesuai dengan peraturan di Indonesia. Para anggota TNI ditugaskan atau diperintahkan untuk menjaga ketahanan nasional negara, melindungi negara dari ancaman-ancaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Perlu untuk dijelaskan bahwa ketahanan nasional dalam bidang Pertahanan dan Keamanan (hankam) diartikan sebagai kondisi pertahanan dan keamanan negara dan bangsa Indonesia, yang mencakup aspek usaha pembelaan negara.

“Usaha bela negara ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1, serta UU No. 3 tahun 2002 Pasal 8 dan 9. Saat ini bidang pertahanan menjadi tugas dan juga tanggungjawab TNI yaitu tercantum dalam UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7, sedangkan keamanan menjadi tanggungjawab Polri yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13. Berdasarkan hal itu, TNI mempunyai tugas utama, menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan yang menyangkut keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan Polri terfokus pada: memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, serta pelayanan terhadap masyarakat.”<sup>5</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa TNI menjadi salah satu bagian atau elemen negara yang juga dipergunakan sebagai alat negara untuk mencapai cita-cita negara atau tujuan nasional negara. Tujuan nasional negara ini tentunya yang menghendaki negara dapat

---

<sup>5</sup> Zaenal Fanani dan Adi Bandonu, *Ketahanan Nasional, Regional, dan Global*, (Malang: UMM Press, 2018), h. 20.

berlangsung dengan aman, damai, adil dan makmur. Oleh karena itu, membutuhkan seluruh warga negara Indonesia untuk mewujudkannya, terutama untuk menjaga kedaulatan negara membutuhkan TNI yang merupakan salah satu komponen utama di dalamnya selain Polri. Jadi, dalam hal ini, negara dan juga bangsa sangat membutuhkan TNI untuk mempertahankan negara dari permasalahan internal maupun eksternal negara.

TNI sebagai ketahanan nasional bagi Indonesia adalah hal yang tentu terkait dengan pemerintahan yang ada di dunia. Setiap negara yang ada di dunia ini pasti memiliki pemerintahannya masing-masing. Pemerintahan dalam pelaksanaannya untuk menjaga kestabilan bangsa dan negara, karena tanpa pemerintah yang mengatur suatu negara pasti akan terjadi kekacauan. Selain itu, mengarah pada pandangan teologis, dengan jelas firman Tuhan menyatakan bahwa dalam Roma 13:4 yaitu : “Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyangkal pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.” Oleh sebab itu, melalui penjelasan dalam ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa pemerintah adalah baik untuk mengatur manusia yang merupakan warga negara itu sendiri, jika menyimpang dari perbuatan moral yang salah, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Pemerintah yang menjalankan pemerintahannya, tentu melakukan berbagai cara untuk mempertahankan keberlangsungan negara supaya selalu dapat dikendalikan dan meminimalisir kekacauan yang ada. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan negara ialah dengan “memaksa” masyarakat untuk tunduk dengan aturan atau norma yang ada. Sama halnya dengan para anggota TNI yang bekerja menjalankan tugas atas perintah atasan, yang di dalamnya secara legal melakukan “kekerasan”. Namun, “kekerasan” adalah hal yang menyakiti orang lain. Lalu, bagaimanakah gereja dalam hal ini menyikapinya? Bagaimana sikap gereja, khususnya sikap pimpinan GKE mengenai anggota

jemaat yang menjadi abdi negara (TNI)? Tentunya para pemimpin GKE memiliki pandangan tersendiri mengenai hal ini, sehingga perlu untuk mencari sikap yang baik untuk menyikapi masalah ini.

Perjanjian Baru umumnya, dan secara khusus dalam “Khotbah di Bukit” yang menyatakan sikap Yesus adalah anti kekerasan,<sup>6</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa, jika salah satu anggota jemaat saja yang menjadi anggota TNI maka pastinya akan menjadi masalah. Hal tersebut pasti sudah bertentangan dengan ketetapan gereja yang mendasarkan teologinya pada jalan pacifisme (anti kekerasan). Untuk itu pula, ada landasan yang kuat bagi gereja untuk menolak jika ada salah satu anggota jemaat yang menjadi TNI, karena TNI dalam pelaksanaan tugasnya tidak mungkin tidak bersentuhan dengan kekerasan dalam mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara.

Gereja dan militer memang memiliki perbedaan yaitu berasal dari dua lembaga (agama dan alat pertahanan negara) berbeda. Namun, keduanya pun memiliki persamaan yaitu sama-sama ingin menjaga perdamaian atau melaksanakan tugas yang baik dalam membantu sesama ketika mengalami kesulitan (bencana atau ketidakamanan). Maksudnya di sini ialah gereja menjadi alat Tuhan dalam menjalankan misi-Nya di dunia, yaitu memberitakan firman Tuhan dan dalam pelaksanaannya gereja juga menjalankan kehendak Tuhan atas dunia, yang salah satunya ialah mewujudkan perdamaian. TNI pun juga jelas dalam tugasnya adalah menjaga keamanan, ketahanan dan perdamaian maupun keutuhan negara serta membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti membantu orang-orang yang terkena bencana. Walaupun demikian, keduanya, baik gereja maupun TNI mempunyai caranya masing-masing dalam menjalankan fungsinya untuk jemaat dan masyarakat secara umum. Terkait dengan hal ini, gereja tentu dengan senang hati melaksanakan kehendak Tuhan dengan jalan pacifis (non-kekerasan). Namun, berbeda dengan militer, yang tentunya dalam menjalankan perannya

---

<sup>6</sup> Emanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), h. 196.



menjaga keamanan atau perdamaian dengan jalan kekerasan yang jika hal tersebut dibutuhkan dalam waktu tertentu. Jika adanya gangguan dari dalam atau dari luar, yang mengganggu ketahanan secara nasional (terorisme atau perang).

Berkaitan dengan gereja, diketahui bahwa Kristus sebagai kepala gereja menuntut agar segala sesuatu yang dikehendaki-Nya dapat dijalankan dengan teratur dan baik. GKE pun dalam hal ini menyadari dan mengisyafinya, bahwa sebagai tubuh Kristus yang kelihatan yaitu gereja tentu masih dan terus bergumul di dalam dunia ini.<sup>7</sup> Untuk itu, GKE pun tentu menganut ajaran Yesus Kristus karena sebagai pengikut Kristus tentu menjurus juga ke arah pacifisme. Meskipun demikian, sikap pimpinan GKE terhadap TNI belum dapat diketahui secara pasti. Sejauh ini yang dilihat oleh penulis sebagai anggota jemaat GKE, para pendeta GKE tidak pernah ada menyinggung tentang ketidaksepahamannya dengan TNI. Penulis melihat ada banyak anggota jemaat GKE yang menjadi anggota TNI, padahal TNI tidak selalu mengikuti jalan pacifisme. Oleh sebab itu, fenomena semacam ini patut bagi penulis untuk dipertanyakan dan diteliti lebih dalam lagi.

Berkaitan dengan asal terbentuknya GKE, gereja ini merupakan hasil dari kegiatan pekabaran Injil dari para misionaris Perhimpunan Pekabaran Halle Denmark (*Danisch Hallische Mission - DHM*), Perhimpunan Pekabaran Rhein (RMG), dan Perhimpunan Pekabaran Injil Basel (*Basler Missiongesellschaft – BMG*). Pada mulanya DHM bekerja di daerah Kalimantan, tapi diserahkan kepada RMG pada tahun 1835. RMG mulai bekerja di Kalimantan pada tahun 1836. RMG pun berhasil dalam pekerjaannya, sehingga terbentuklah jemaat yang terdapat di daerah hilir Sungai Murung, Kapuas, Kahayan, dan Barito.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut, GKE, dari namanya pun telah jelas bahwa letaknya ialah di Kalimantan, yaitu salah satu pulau yang terdapat di Indonesia. Kalimantan terdiri atas 5 (lima) provinsi : Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan

---

<sup>7</sup> Fridolin Ukur, *Tuaiannya Sungguh Banyak : Sejarah Gereja Kalimantan Evangelis Sejak Tahun 1835*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), h. 179.

<sup>8</sup> F. D. Wellem, *Kamus Sejarah Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 119.

Barat, dan Kalimantan Utara. Seluruh wilayah Kalimantan inilah yang menjadi tempat atau wadah pendeta-pendeta GKE dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Wilayah Kalimantan secara menyeluruh ini tentu sangatlah besar dan luas. Tentunya pula memiliki banyak sekali anggota jemaat yang tergabung di dalamnya, yang telah tersebar di seluruh penjuru Kalimantan. Oleh sebab itu, anggota jemaat yang ada pasti juga menggeluti berbagai profesi dalam pekerjaannya, yang salah satu profesinya adalah sebagai TNI.

Penelitian awal yang telah penulis lakukan melalui wawancara via telepon dengan ketua resort GKE, yang mengambil latar belakang penelitian bertempat di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mendapatkan hasil sementara bahwa di salah satu resort yang merespon dalam pencarian data ini, total yang didapat baru berjumlah 9 orang, di tambah dengan beberapa anggota yang di kenal oleh penulis berjumlah 4 orang. Di Resort GKE Awang/Hayaping telah diteliti berjumlah 9 orang<sup>9</sup>, di resort-resort lain yang penulis telah ketahui anggota jemaat GKE menjadi anggota TNI adalah di Resort GKE Bambulung berjumlah 1 orang, di Resort GKE Patangkep Tutui berjumlah 1 orang, dan di Resort Tamiang Layang berjumlah 2 orang. Resort yang ada di Kabupaten Barito Timur berjumlah delapan resort, yang baru didapat hasil secara pasti hanya satu resort saja yaitu Resort GKE Awang/Hayaping tempat penulis juga berdomisili. Untuk itu, masih ada tujuh resort lagi yang belum didapat datanya secara pasti yaitu Resort GKE Tamiang Layang, Resort GKE Bambulung, Resort GKE Patangkep Tutui, Resosrt GKE Paku, Resort GKE Karusen Janang, Resort GKE Banua Lima, Resort GKE Karau Ampah.

Data di atas menunjukkan bahwa, ada anggota jemaat GKE yang menjadi anggota TNI, walaupun data yang didapat baru dari satu resort saja, sehingga, dapat dikatakan pula bahwa, meskipun belum didapat data yang valid secara menyeluruh dari Kabupaten Bartim, satu resort saja sudah menunjukkan profesi sebagai TNI cukup diminati banyak orang, tanpa

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Pdt. Maria Ekasari M.Div, Ketua Resort GKE Awang, (Via telepon : 21 September 2019).

terkecuali para anggota jemaat GKE itu sendiri. Perlu ada penelitian lanjutan dan langsung terjun ke lapangan untuk mendata dengan lebih lagi mengenai jumlah anggota jemaat GKE yang menjadi anggota TNI. Penelitian ini pun, seperti yang telah dijelaskan yang berkaitan dengan TNI, tentunya TNI juga umumnya yang dihubungkan dengan perang. Dewasa ini, perang menjadi pembahasan yang cukup besar karena berhubungan dengan diperbolehkan atau tidaknya perang secara moral. Ada suara-suara dewasa ini yang mengutuk setiap bentuk peperangan yang terjadi pada zaman sekarang. Walaupun perang bisa saja dahulunya dibenarkan sebagai sarana untuk membela diri, tapi hal itu sama sekali tidak boleh lagi dianggap sebagai hal yang sah dalam keadaan sekarang ini. Hal ini dikarenakan malapetaka yang dihasilkannya selalu lebih berat daripada kerusakan yang mungkin menimpa suatu negara.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, penolakan atau penerimaan dalam hal ini haruslah memiliki dasar yang benar, agar segala sesuatu yang berkaitan dengan moral dapat diseleksi mengenai benar atau salah, atau mengenai tepat atau tidaknya perang dilakukan.

Perspektif awal yang dikemukakan penulis dalam memberikan pendapat tentang sikap pendeta-pendeta GKE adalah para pendeta GKE bersikap selektivisme. Selektivisme adalah perang adakalanya benar, di saat perang itu dilakukan dalam bentuk perang yang adil.<sup>11</sup> Maksudnya di sini ialah perang yang dilakukan sesuai dengan situasi dan dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan pemerintah dalam suatu negara. Penulis pun menyatakan bahwa pendeta-pendeta GKE bersikap selektivisme, karena penulis mengamati selama ini mereka sepertinya menerima saja anggota jemaat yang menjadi anggota TNI, tidak ada penolakan atau masalah lainnya. Oleh sebab itu, penulis berpikir bahwa para pemimpin GKE memiliki sikap selektivisme. Namun, hal tersebut masih dapat terjadi perubahan ketika penulis terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian.

---

<sup>10</sup> Norman L Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer-Edisi Kedua / Norman L Geisler—alih bahasa*, (Malang: Literatur SAAT, 2015), h. 98.

<sup>11</sup> Norman L Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer-Edisi Kedua / Norman L Geisler—alih bahasa*, (Malang: Literatur SAAT, 2015), h. 292.

Penelitian dalam tulisan ini pun mengarah pada pencarian dasar dalam menentukan sikap dari para pemimpin GKE, mengenai anggota jemaat GKE menjadi anggota TNI. Hal yang terutama dan yang terpenting di sini, untuk mendapatkan sikap pimpinan GKE terhadap fenomena ini, membutuhkan narasumber yang benar, yaitu para pendeta yang tergabung dalam Majelis Sinode GKE. Masalah ini pun sangat menimbulkan pertanyaan bagi penulis, kenapa selama ini pimpinan GKE hanya diam saja melihat banyaknya anggota jemaat menjadi anggota TNI? Apakah secara sadar mereka telah menerima dan tidak mempermasalahkannya? Ataupun ada syarat-syarat tertentu untuk menyetujui hal ini? Jadi, penelitian yang akan dilakukan di sini menjadi acuan untuk menemukan sikapnya, dengan cara menganalisis hasil penelitian nantinya dengan teori-teori yang digunakan dalam tulisan ini.

Penelitian yang akan dilakukan di sini secara khusus ialah dilakukan di Sinode GKE yang terletak di Banjarmasin yang menjadi bagian paling atas dari struktur GKE, dan di wilayah pelayanan GKE tepatnya di daerah Barito Timur. Hal ini diharapkan agar dapat melihat dan menemukan tentang sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota TNI dalam konteksnya yang tentunya memiliki peraturan gereja, maupun dalam tradisi gereja, dan hal lainnya yang akan menjadi dasar tentang sikap pimpinan GKE terhadap TNI. Pernyataan tersebutlah juga yang mendasari penulis dalam menetapkan judul berikut: **“Sikap Pimpinan Gereja Kalimantan Evangelis Terhadap Anggota Jemaat Yang Menjadi Anggota TNI”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, di sini akan dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota TNI, dan mengapa para pemimpin GKE mengambil posisi semacam itu?
2. Setelah melakukan penelitian, bagaimanakah sikap selektivisme pimpinan GKE dapat dibuktikan? Bagaimana sikap selektivisme pimpinan GKE terhadap teologi Calvin tentang gereja dan negara, serta prinsip bela negara?

## **C. JUDUL TESIS**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka judul yang ditetapkan penulis untuk tesis ini adalah: **“SIKAP PIMPINAN GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS TERHADAP ANGGOTA JEMAAT YANG MENJADI ANGGOTA TNI”**.

## **D. BATASAN WILAYAH PENELITIAN**

Penulis di sini memfokuskan wilayah penelitian yang akan diadakan di Sinode GKE Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, latar belakang tempat mencari data anggota jemaat yang menjadi anggota TNI adalah di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan, Kalimantan Tengah memiliki 13 kabupaten dan dirasa penulis terlalu luas jika harus diteliti semuanya. Oleh sebab itu, penulis memilih satu kabupaten, tempat untuk mencari data, dan kabupaten tersebut adalah Kabupaten Barito Timur. Penulis pun sudah cukup mengetahui tentang wilayah Barito Timur ini karena merupakan tempat tinggal sejak kecil. Selain itu, selama penulis bertempat tinggal, penulis pun melihat dan memperhatikan bahwa ada cukup banyak anggota jemaat GKE yang menjadi anggota TNI.

Hal itulah yang mendasari penulis untuk menjadikan Kabupaten Barito Timur sebagai landasan tempat penelitian.

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian di sini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota TNI, dan untuk mengetahui tentang dasar para pemimpin GKE mengambil posisi semacam itu.
2. Untuk mengetahui sikap selektivisme pimpinan GKE, dan sikap selektivisme pimpinan GKE terhadap teologi Calvin tentang gereja dan negara, serta terhadap prinsip bela negara.

#### **F. HIPOTESA**

Hipotesa penulis terhadap sikap pimpinan GKE adalah para pemimpin GKE bersikap selektivisme, yang dalam hal ini dilandaskan pula pada teologi Calvin tentang gereja dan negara, serta prinsip bela negara yang berkembang dimasyarakat Indonesia, terkait dengan sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaat GKE yang menjadi anggota TNI.

#### **G. METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan tujuan penelitian, metodologi penelitian yang akan digunakan di sini adalah metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data secara alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Peneliti di sini sebagai instrumen kunci. Peneliti kualitatif ini merupakan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif ini, data yang diperoleh melalui pengumpulan data, dianalisis, dan

diinterpretasikan. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang berdasarkan pada realitas yang holistik, kompleks, dan rinci.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini yang digunakan di sini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Kehadiran peneliti di lapangan adalah hal yang mutlak, karena bertindak sebagai instrumen penelitian.<sup>13</sup> Hal yang berupa kehadiran peneliti lapangan ialah saat melakukan wawancara. Moleong (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya. Hubungan tersebut membutuhkan kualitas pribadi, terutama pada saat melakukan wawancara. Peneliti harus memiliki kualitas seperti: toleran, sabar, empati, menjadi pendengar yang baik, manusiawi, terbuka, jujur, objektif, berpenampilan menarik, mudah bergaul, senang bicara, dan menyukai pekerjaan wawancara. Peneliti tidak cepat jenuh dengan pekerjaan dan mampu mengatasi tekanan batin karena tekanan psikologis saat berada di lapangan. Selain itu, peneliti harus mempunyai perasaan ingin tahu terhadap segala sesuatu dan senantiasa mengharapkan bahwa informasi yang diharapkan bisa datang tanpa diduga.<sup>14</sup>

Wawancara yang akan dilakukan di sini ialah dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mencari tentang sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota TNI. Untuk itu, yang menjadi narasumber penelitian ialah para pejabat sinode yang menjadi narasumber utama dalam penelitian ini atau dapat dikatakan dengan narasumber kunci. Namun, dapat juga diwawancarai orang-orang yang juga tahu tentang hal ini, seperti halnya para pimpinan GKE.

---

<sup>12</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8-9.

<sup>13</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 75.

<sup>14</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 79.

## 2. Dokumentasi

Satori dan Komariah (2012) menjelaskan bahwa definisi dari dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.<sup>15</sup> Mengacu hal tersebut, dokumen merupakan kumpulan dari bahan tertulis ataupun film (berbeda dari catatan), yaitu yang berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian. Istilah dokumen itu sendiri merujuk pada materi seperti foto, video, film, memo, surat, catatan harian, catatan kasus klinis, dan memorbilia segala macam yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan.<sup>16</sup> Dokumentasi di sini dibutuhkan untuk mencari dokumen yang dapat dipergunakan untuk informasi tambahan mengenai sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota TNI. Seperti halnya, dokumen-dokumen Gereja dari hasil-hasil seminar atau dokumen-dokumen lainnya, untuk menjelaskan mengenai sikap para pemimpin GKE tersebut.

## H. METODE PENULISAN

Pada saat penulisan, tulisan diawali dengan fakta-data dari objek (peristiwa) yang diteliti. Berbagai kasusnya mengimplikasikan fokus masalah yang hendak dilaporkan.<sup>17</sup> Penulis dalam hal ini, diketahui mengambil metodologi penelitian kualitatif. Secara ringkas, penulis laporan kualitatif harus memperhatikan unsur-unsur: pengantar permasalahan, ulasan literatur, uraian prosedur riset, penyajian apa yang ditemukan, dan pernyataan yang menyatakan implikasi dan konklusi. Jika diurutkan, unsur-unsur tersebut akan tersusun ke dalam unsur penulisan pada umumnya, yakni: *a beginning* (awal), *middle* (tengah), dan *end*

---

<sup>15</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 145.

<sup>16</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 146.

<sup>17</sup> Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 69.



(akhir).<sup>18</sup> Seperti halnya Gorman dan Clayton membaginya ke dalam struktur yang unsur-unsurnya memiliki pernyataan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- *Tell them what you're going to tell them* (Katakan pada mereka apa yang hendak Anda katakan)
- *Tell them* (katakan pada mereka)
- *Tell them what you've told them* (Katakan pada mereka apa yang Anda temukan)

Penulisan kualitatif, lebih dari sekedar pendeskripsian. Penulis tulisan ilmiah kualitatif justru bertujuan untuk mendalami pemahamannya mengenai sebuah topik, dan ini dilakukannya melalui interpretasi dari apa yang telah ditemukannya. Akan tetapi bukan berdasar pemikiran yang berbentuk *judgmental* dan perspektif, melainkan melalui temuan-temuan pemaknaan dari kehidupan dan segala kejadiannya, sehingga dari hal tersebut, penulisan ilmiah kualitatif seseorang diukur keberadaannya.<sup>20</sup>

Pendekatan yang digunakan di sini ialah dengan menggunakan orientasi pospositivis. Jika ditinjau dari perspektif pospositivis, penelitian kualitatif harus bersifat: (a) *eksploratif*, yaitu peneliti harus memahami fenomena secara garis besar tanpa mengabaikan kemungkinan pilihan fokus tertentu secara khusus; (b) *eksplantatif*, yaitu peneliti harus memahami ciri dan hubungan sistematis fenomena tersebut berdasarkan fakta lapangan; (c) *teoritis*, peneliti diharapkan mampu menghasilkan formasi teori secara substantif berdasarkan konseptualisasi, abstraksi ciri, dan sistematisasi hubungan konsep berdasar pada relasi dan kemungkinan variasinya, dan (d) *praktis*, peneliti di sini harus mampu memahami makna fenomena yang dihubungkan dengan keperluan terapan atau nilai-nilai praktis tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 77.

<sup>19</sup> Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 77.

<sup>20</sup> Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 80.

<sup>21</sup> Albi Anggito, JohanSetiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 14-15.

Di sini, penulis akan memaparkan atau menguraikan tentang hasil penelitian yang dianalisis dengan teori-teori dari berbagai sumber. Oleh karena itu, dari hal itu semua, dapat menghasilkan hasil penelitian yang mendalam dari topik pembahasan yang diteliti. Seperti dalam hal ini, dapat menggali lebih dalam tentang sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota TNI.

## **I. KERANGKA TEORITIS**

Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penulisan ini ada tiga teori yaitu: (1) Selektivisme, (2) Teologi Calvin tentang Gereja dan Negara, (3) Prinsip Bela Negara. Teori-teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis hasil dari penelitian mengenai sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota TNI.

### **1. Selektivisme**

Pandangan awal dari penulis mengenai sikap pendeta-pendeta GKE adalah mereka bersikap selektivisme, sehingga teori tersebut yang dianggap perlu dan juga penting bagi penulis untuk menjadi dasar dari menganalisis hasil penelitian. Teori ini berangkat dari Pandangan Norman L Geisler dalam bukunya *Etika Kristen: Pilihan dan isu Kontemporer* dan didukung dengan pandangan dari Agustinus mengenai selektivisme (perang yang adil). Selektivisme menyatakan atau menjelaskan bahwa berperang adakalanya benar ketika perang itu adalah perang yang adil.<sup>22</sup> Salah satu dari masalah tersulit bagi selektivisme adalah menetapkan siapa yang berdaulat memutuskan perang mana yang adil dan mana yang tidak. Bukankah akan timbul kekacauan jika setiap orang di suatu negara boleh memutuskan apakah dia harus menaati hukum tertentu atau tidak? Meskipun selektivisme menempatkan tanggung

---

<sup>22</sup> Norman L Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer-Edisi Kedua / Norman L Geisler—alih bahasa*, (Malang: Literatur SAAT, 2015), h. 292.

jawab individual yang berat, namun hal semacam ini diperlukan karena beberapa alasan. Suatu pandangan tidak bisa dianggap salah hanya karena pandangan tersebut sulit.<sup>23</sup>

Pergumulan kaum selektivis bukanlah tanpa pedoman moral. Kaum selektivis tidak menentukan perang mana yang adil berdasarkan perasaan subjektif. Sebaliknya, mereka berusaha menemukan perang mana yang adil berdasarkan prinsip moral yang objektif. Jadi, bukan seolah-olah kaum selektivis sepenuhnya mengambil keputusan sendiri tanpa pimpinan dari Tuhan. Allah telah menyatakan apa yang adil dan yang tidak, dan prinsip keadilanlah yang digunakan kaum selektivis untuk mengetahui apakah suatu peperangan di mana pemerintah memanggil mereka untuk bergabung, adil atau tidak. Memang, kaum selektivis harus menemukan fakta-fakta bagi masalahnya sendiri, tetapi mereka diberikan batasan nilai untuk membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh. Oleh sebab itu, setiap orang bertanggung jawab hanya untuk membuat keputusan terbaik dengan pertimbangan fakta-fakta yang sudah ada.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai teori selektivisme ini, maka dapat dikatakan bahwa teori ini memang sangatlah penting untuk penelitian ini. Hal ini dikarenakan teori ini dapat menilai sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaatnya yang menjadi anggota TNI. Telah diketahui pula bahwa para pemimpin GKE selama ini hanya diam saja dan tidak mempunyai sikap yang tegas dalam menentukan sikapnya. Jadi, dalam hal ini pula, penulis mendasari pendapatnya bahwa teori ini dapat dijadikan dasar sikap pimpinan GKE, karena teori ini menjelaskan tentang perang yang adil.

---

<sup>23</sup> Norman L Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer-Edisi Kedua / Norman L Geisler—alih bahasa*, (Malang: Literatur SAAT, 2015), h. 292.

<sup>24</sup> Norman L Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer-Edisi Kedua / Norman L Geisler—alih bahasa*, (Malang: Literatur SAAT, 2015), h. 289.

## 2. Teologi Calvin tentang Gereja dan Negara

GKE menganut aliran Protestan, dan GKE pun tentunya memiliki tokoh yang disepakati dalam tata layanannya, termasuk dalam kehidupan bergereja. Baik itu dalam pelaksanaan kegiatan gereja, maupun hubungan gereja dengan masyarakat secara plural. Tokoh yang diusung di sini ialah Yohanes Calvin (Selanjutnya disebut Calvin) yang akan berbicara mengenai eklesiologi (ajaran gereja), sehingga di sini pun dalam penulisannya yang menjadi arah penulisan ialah yang berada dalam aliran Calvinisme. Ada beberapa gereja yang mengaku sebagai Calvinis atau paling tidak yang dipengaruhi oleh Calvinisme yaitu seperti GMIT, GPIB, GKI, GMIM, GPM, GKP, GKJW, GKPB, GKS, GMIST, GKST, Gereja Toraja, dan termasuk di dalamnya adalah GKE.<sup>25</sup> Menurut Calvin, gereja yang sebenarnya ialah gereja yang berada di hadirat Allah. Gereja yang diterima hanyalah dia yang oleh rahmat Allah diangkat menjadi anak-Nya dan oleh karena penyucian karya Roh Kudus untuk menjadi anggota Kristus. Gereja tidak hanya merangkul semua orang kudus yang mendiami bumi, melainkan juga semua orang pilihan yang telah hidup sejak awal zaman.<sup>26</sup> Seperti yang terdapat dalam pokok pembahasan, maka selanjutnya akan dibahas mengenai teologi Calvin tentang gereja dan negara.

Orang yang mampu dalam membedakan antara jiwa dan raga, antara kehidupan sekarang yang fana dan kehidupan kelak yang kekal, akan dapat memahami dengan mudah bahwa kerajaan Kristus yang rohani dan tata tertib sipil itu merupakan perkara-perkara yang sangat besar perbedaannya.<sup>27</sup> Maksud perbedaan tersebut bukanlah supaya tiap-tiap orang mengira bahwa pemerintahan sipil itu perkara yang kotor, yang bukan urusan orang Kristen.

---

<sup>25</sup> Jan S. Aritonang, *Berbagai Aliran di dalam dan di sekitar Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 52.

<sup>26</sup> Yohanes Calvin, *Institutio : Pengajaran Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), h. 231.

<sup>27</sup> Yohanes Calvin, *Institutio : Pengajaran Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 311.

Namun, kerajaan Kristus yang rohani dan batiniah sifatnya itu, maka harus diketahui pula diketahui bahwa antara keduanya itu tidak ada pertentangan mengenai hal apapun.<sup>28</sup>

Kerajaan Kristus yang sekarang ini ada di dunia, sudah mulai menanamkan di dalam diri masing-masing orang beberapa asas dari Kerajaan Sorgawi dan kerajaan itu di dalam kehidupan yang fana dan yang akan binasa sudah mulai sedikit demi sedikit memulai kebahagiaan yang kekal dan yang tidak akan binasa.<sup>29</sup> Namun, tugas pemerintah sipil ialah selama masih hidup di tengah-tengah orang, mendukung, dan melindungi penyembahan kepada Allah dari sudut lahiriah, mempertahankan ajaran yang sehat tentang agama dan membela kedudukan gereja, mengatur kehidupan dengan berpedoman pada pergaulan masyarakat, dan membina kesusilaan sesuai dengan keadilan.<sup>30</sup> Sama halnya seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Negara, merukunkan sesama dan memupuk perdamaian serta ketenteraman umum.<sup>31</sup>

Maksud dari pemerintahan sipil bukanlah semata-mata supaya orang bisa bernafas, makan maupun minum, akan tetapi supaya penyembahan berhala, hujat terhadap nama Allah, penghinaan terhadap kebenaran-Nya, dan nista terhadap agama, tidak sampai timbul terang-terangan dan menyebar di antara rakyat.<sup>32</sup> Begitu pula dengan Yesaya yang berjanji bahwa raja-raja akan menjadi pengasuh, dan permaisuri-permaisuri menjadi inang Gereja (Yes. 49:23), ia tidak hendak merenggut kehormatan dari mereka, tetapi mengangkat mereka menjadi pelindung-pelindung dari hamba-hamba Allah yang saleh.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Yohanes Calvin, *Institutio : Pengajaran Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 312-313.

<sup>29</sup> Yohanes Calvin, *Institutio : Pengajaran Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 313.

<sup>30</sup> Yohanes Calvin, *Institutio : Pengajaran Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 313.

<sup>31</sup> Yohanes Calvin, *Institutio : Pengajaran Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 313.

<sup>32</sup> Yohanes Calvin, *Institutio : Pengajaran Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 314.

<sup>33</sup> Yohanes Calvin, *Institutio : Pengajaran Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 315.

Jadi, dalam hal ini, teori mengenai teologi Calvin tentang gereja dan negara ingin menunjukkan bahwa keduanya dapat menjalin hubungan yang baik. Tidak hanya melulu memandang pemerintah itu jahat, tapi lebih kepada orang-orang Kristen dapat ikut serta dalam membangun negara dalam pemerintahan, seraya dengan mencari langsung kehendak Allah dalam suatu negara. Juga di sini yang ingin dicari ialah bagaimana sikap pimpinan GKE apakah sudah benar-benar menjalankan yang dinyatakan oleh Calvin atau tidak, atau pimpinan GKE mempunyai pandangan atau sikap lain tentang hubungannya dengan negara? Untuk itu menurut penulis perlu lebih lagi dalam mencari data-data, baik itu dalam bentuk dokumen Gereja atau bentuk lainnya agar hasil penelitian dapat dianalisis. Selain itu, melalui ini semua, diharapkan dapat menghasilkan suatu sikap pimpinan GKE yaitu seperti halnya, jika pimpinan GKE menolak anggota jemaat menjadi anggota TNI apa dasarnya? Jika mereka menerima apa dasarnya? Atau jika mereka menerima dengan bersyarat, apa dasarnya? Oleh sebab itu, dasar dari teologi Calvin mengenai gereja dan negara sangatlah perlu untuk penelitian ini.

### **3. Prinsip Bela Negara**

Berkaitan dengan mempertahankan negara, maka ancaman yang paling besar yang dapat terjadi adalah agresi bersenjata yang dilakukan oleh satu atau beberapa negara terhadap wilayah negara Indonesia, sehingga, hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan sejak dini ialah persiapan pertahanan yang menyangkut penyelenggaraan negara dalam menghadapi agresi bersenjata dari pihak lawan. Sebenarnya tatanan internasional melarang suatu negara melakukan agresi bersenjata terhadap negara lain, dan tindakan ini dianggap melanggar hukum (*unlawful*). Namun, apabila agresi bersenjata tetap dilakukan oleh suatu negara, maka negara yang diserang mempunyai hak yang melekat (*inherent right*) untuk melawan dengan kekuatan bersenjata pula. Tindakan ini dikategorikan tindakan yang sah secara hukum

internasional, karena tindakan tersebut masuk dalam kategori membela diri (*self-defence*) terhadap agresi bersenjata yang telah terjadi terhadap wilayah negaranya.<sup>34</sup>

Apabila suatu serangan bersenjata dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, maka Dewan Keamanan PBB akan bersidang untuk menilai apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai agresi bersenjata atau bukan. Penilaian yang diberikan oleh para anggota dewan tersebut sangat subjektif, dan sarat dengan kepentingan nasional mereka masing-masing. Sehingga, dalam banyak kasus, mereka tidak dapat mencapai kata sepakat, mengenai tindakan yang dinilai sebagai tindakan melawan hukum atau tidak. Seandainya, jika mereka mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk memberi sanksi terhadap negara yang bermasalah, maka dalam banyak kasus sanksi tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada negara yang berpartisipasi dengan memberikan kekuatan bersenjatanya untuk mengimplementasikan sanksi tersebut. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka setiap negara di dunia didorong untuk menerapkan sistem *self-help* atau membela negaranya dengan kemampuannya sendiri. Artinya jika agresi bersenjata terjadi, maka mereka harus mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk melawan agresi bersenjata tersebut jika tidak ingin negaranya hancur berantakan. Melihat hal tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi negara dan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi agresi bersenjata yang dapat juga terjadi terhadap Indonesia.<sup>35</sup>

Kata *self-defence* yang diambil dari bahasa Inggris “*the use of force to protect yourself against someone who is attacking you*”, artinya tindakan untuk membela diri dari serangan lawan. Lalu, *self-help* merupakan upaya yang dilakukan oleh bangsa sendiri untuk membela negaranya, karena tindakan tersebut dilakukan oleh subjek bangsa secara kolektif dan objek yang dilindungi adalah negara dengan segala isinya, maka kata ‘membela diri’ dapat diperluas menjadi ‘membela negara’. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa,

---

<sup>34</sup> Syaiful Anwar, *Melindungi Negara*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 61.

<sup>35</sup> Syaiful Anwar, *Melindungi Negara*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 65.

kata membela yang juga dikatakan sebagai kata kerja dapat diartikan sebagai ‘memihak untuk melindungi dan mempertahankan’, sehingga dalam konteks ini maka bangsa Indonesia akan memihak kepada negaranya sendiri. Segala tindakan yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk melawan agresi bersenjata pihak lawan adalah sah secara hukum internasional, dan selanjutnya secara sukarela akan berupaya keras untuk melindungi dan mempertahankan negara dari agresi bersenjata pihak lawan.<sup>36</sup>

Berhubungan dengan penjelasan di atas, mengenai upaya bela negara pun berlaku bagi setiap warga negara seperti yang dinyatakan pada:<sup>37</sup>

- a. Pembukaan UUD 1945 alenia pertama yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
- b. Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 mengatakan: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- c. Pasal 30 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 mengatakan: “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Upaya Bela Negara merupakan pertahanan negara seperti termuat pada Pasal 1 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keutuhan bangsa dan negara.” Upaya Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI yang

---

<sup>36</sup> Syaiful Anwar, *Melindungi Negara*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 66.

<sup>37</sup> Gembong Baskoro, *Bela Negara di Kampus Berwawasan Internasional*, (Resimen Mahasiswa dan IARMI: Swiss German University), h. 3.



berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.<sup>38</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, setiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negaranya, khususnya apa yang dilakukan oleh anggota TNI. Apapun yang dilakukan untuk membela negara Indonesia dianggap sah oleh pihak internasional. Asalkan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diketahui, bela negara tidak hanya tentang mengangkat senjata melawan musuh, tapi tindakan-tindakan lain seperti halnya “mengharumkan nama bangsa” juga merupakan wujud bela negara. Menjaga nama baik bangsa dalam bentuk-bentuk tindakan nyata (menjaga perdamaian) dalam bermasyarakat pun adalah membela negara. Oleh karena itu, salah satu dasar para pemimpin GKE dalam kemungkinan mengambil sikap menerima anggota jemaat menjadi anggota TNI adalah karena TNI bertindak atas dasar bela negara itu sendiri. Jadi, penulis merasa perlu untuk memasukan teori ini sebagai landasan bahwa alasan pimpinan GKE untuk membiarkan anggota jemaatnya, menjadi anggota TNI sebagai tindakan bela negara, yang selain karena sah menurut negara tetapi juga sesuai dengan ajaran gereja yang dihidupi.

## **J. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai sistematika yang akan dikerjakan dalam penulisan tulisan ini, sehingga dapat menjadi gambaran untuk para pembaca dalam membaca dan juga memahaminya.

---

<sup>38</sup> Gembong Baskoro, *Bela Negara di Kampus Berwawasan Internasional*, (Resimen Mahasiswa dan IARMI: Swiss German University), h. 3.

## **1. Bab I Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang berbagai hal-hal yang perlu untuk dipaparkan yaitu seperti: latar belakang masalah, rumusan masalah, judul tesis, batasan wilayah penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, metode penulisan, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan.

## **2. Bab II Sejarah GKE dan Hubungannya dengan TNI**

Bab ini akan membahas tentang sejarah GKE yang didapat dari hasil penelitian. Hasil penelitian mengenai sejarah GKE ini, didapat dari berbagai sumber yaitu yang terkait dengan sejarah tersebut. Seperti dari buku-buku, berbagai dokumen-dokumen dalam sidang GKE atau naskah-naskah konferensi atau seminar gereja dan masyarakat, agar dalam hal ini dapat menemukan dan memahami gambaran umum tentang GKE. Selain itu, di sini juga akan disisipkan tentang GKE dalam hubungannya dengan TNI, jika sebelumnya GKE pernah punya hubungan dengan TNI, yaitu seperti halnya dalam melakukan pelayanan kepada jemaat atau dalam hal-hal lainnya, yang juga punya kaitan dengan hubungan keduanya.

## **3. Bab III Landasan Teori Tentang Selektivisme**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis hasil dari penelitian. Teori-teori tersebut ialah seperti teori selektivisme. Teori selektivisme ini dipergunakan untuk menganalisis tentang sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota TNI. Teori ini digunakan karena perspektif awal penulis di sini ialah pimpinan GKE memiliki sikap selektivisme, yang berarti para pemimpin GKE menerima anggota jemaat menjadi anggota TNI dengan memiliki sikap dasar. Sikap dasar tersebut ialah TNI yang menggunakan kekerasan, hanya ketika diharuskan menggunakannya tergantung keadaan. Seperti halnya keadaan yang darurat atau perang. Selebihnya, TNI tidak melakukan

tindak kekerasan jika hal itu tidak diperlukan. Itulah dasar teori selektivisme yang digunakan untuk penelitian ini.

#### **4. Bab IV Analisis Terhadap Sikap Selektivisme Pimpinan GKE**

Bab ini berisi tentang analisis terhadap penilaian atas sikap teologis GKE terhadap anggotanya, yang menjadi anggota TNI dengan menggunakan teori selektivisme dari bab sebelumnya. Maksudnya ialah menganalisis sikap pimpinan GKE dengan teori selektivisme yang telah diuraikan dan menentukan sikap pimpinan GKE yang sesuai dengan teori selektivisme. Namun, di dalam analisis ini juga, teori selektivisme belum tentu sama dengan sikap para pemimpin GKE. Bisa saja tidak ada kecocokan yang terjadi antara hasil penelitian dan landasan teori yang ada. Selain itu, di sini juga akan dipaparkan mengenai analisis sikap selektivisme pimpinan GKE terhadap teologi Calvin tentang gereja dan negara, serta terhadap prinsip bela negara.

#### **5. Bab V. Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan menyeluruh dari hasil penelitian maupun dari hasil tesis yang telah selesai dalam proses penyelesaiannya. Pada bab ini juga akan dipaparkan beberapa saran bagi ruang lingkup akademik dan kritik dari penulis untuk sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota TNI, berdasarkan tiga teori utama yang telah ditetapkan dalam tulisan ini. Jadi, dari apa yang diteliti oleh penulis dapat memberikan sumbangsih yang baik, yang dibutuhkan dalam rangka berteologi dimasa-masa yang akan datang, maupun bagi kehidupan tiap-tiap orang secara umumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa hal yang terkait dengan topik tesis, yaitu mengenai sikap pimpinan GKE terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota TNI. Hal-hal mengenai sikap tersebut, maka di sini akan diuraikan tentang kesimpulan, saran, kritik, dan rekomendasi yang tentunya didasarkan pada pembahasan di bab-bab (bab 1 sampai dengan bab 4) sebelumnya.

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang akan disimpulkan di sini, akan dijabarkan ke dalam beberapa bagian yaitu seperti sikap pimpinan GKE berdasarkan teori selektivisme, sikap pimpinan GKE berdasarkan teologi Calvin tentang gereja dan negara, dan sikap pimpinan GKE berdasarkan prinsip bela negara.

##### **1. Sikap Pimpinan GKE berdasarkan Teori Selektivisme**

Teori selektivisme menyatakan bahwa orang Kristen dapat berpartisipasi dalam suatu perang, jika perang tersebut adalah perang yang adil. Pernyataan mengenai perang yang adil, tidak hanya dapat dikatakan adil saja, tapi perang yang adil memiliki banyak indikasi untuk menyatakan bahwa perang itu adil. Perang yang adil mengacu pada perang yang ditujukan untuk menghasilkan perdamaian di akhir perang. Perang yang adil tidak mengambil keuntungan dari bangsa atau negara yang kalah perang. Jika mengikuti suatu perang, perang yang adil harus berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan dendam ataupun nafsu untuk memusnahkan. Intinya, perang yang adil dan yang dapat dibenarkan adalah perang yang dilakukan untuk meluruskan berbagai hal yang menyangkut dengan ketidakadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pimpinan GKE pun dalam berbagai pernyataannya melalui wawancara yang dilakukan membenarkan tindakan para anggota TNI dalam menjalankan tugasnya. Bagi mereka, anggota TNI yang melaksanakan tugas-tugas di lingkungan sekitar mereka, selalu menjalankan tugas mereka dengan baik. Para anggota TNI yang seringkali mengamankan keadaan saat para pemimpin GKE melakukan pelayanannya, memberikan gambaran bahwa anggota TNI akan bertindak jika terjadi sesuatu yang salah atau menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku.

Jadi, sesuai dengan pernyataan teori maupun penjelasan para pemimpin GKE, TNI pasti melihat situasi dan kondisi yang terjadi, jika memang ada hal-hal yang tidak baik terjadi maka mereka akan bertindak. Oleh sebab itu pula, pimpinan GKE dalam sikapnya, dapat dikatakan bahwa sikapnya dipengaruhi oleh teori selektivisme, sehingga mereka pun menerima dengan baik anggota jemaatnya yang menjadi anggota TNI.

## **2. Sikap Pimpinan GKE berdasarkan Teologi Calvin tentang Gereja dan Negara**

Calvin dalam teologinya tentang gereja dan negara memberikan beberapa pandangan. *Pertama*, kekuasaan adalah dari Allah, yang ditujukan kepada manusia, untuk dikelola dengan sah dan adil. *Kedua*, Calvin menegaskan bahwa hukum yudisial Musa memang tidak mengikat, tapi prinsip moral dalam setiap perintah harus tetap berlanjut. Artinya, standar moral harus tetap dijalankan oleh setiap orang yang menjalankan kekuasaan atau yang diperintah oleh kekuasaan. *Ketiga*, Calvin menekankan bahwa gereja dan negara menerima tugas yang berbeda dari Allah, gereja mengatur yang rohaniah, negara mengatur yang lahiriah. Pemerintahan sipil dan penguasa-penguasa sipil adalah bagian dari wadah dan wakil-wakil Allah. Baik gereja dan negara tentu menjalankan kehendak Allah untuk memberikan rasa aman dan sejahtera kepada masyarakat di dunia, serta untuk memuliakan nama Tuhan.

Pimpinan GKE, tentu memandang pekerjaan dari seorang TNI dari sudut pandang teologis. Para pendeta GKE pun dalam perspektifnya memandang pekerjaan tersebut adalah untuk menjaga kedamaian dan keadilan dapat terus terjaga, karena Tuhan berkenan terhadap hal-hal seperti itu. Gereja dan lembaga militer adalah dua lembaga yang berbeda, tapi dapat bersama-sama menjadi mitra dalam melaksanakan kehendak Allah di dunia. Selain itu, mengalahkan ketidakadilan adalah bentuk atau cara manusia dalam mengasihi sesamanya, sehingga untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan tindakan-tindakan yang mengharuskan seseorang bertindak dalam situasi yang genting (darurat).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pimpinan GKE pun dalam sikapnya dipengaruhi oleh teologi Calvin. Mengingat dalam hal ini pula bahwa GKE menganut aliran Calvin atau Calvinisme. Oleh sebab itu, para pemimpin GKE dalam sikapnya, memang menerima dengan baik anggota jemaat yang menjadi anggota TNI. Anggota TNI yang adalah anggota jemaat GKE, seringkali meminta rekomendasi dari gerejanya dalam realitanya selama ini diterima dengan baik oleh para pejabat GKE.

### **3. Sikap Pimpinan GKE berdasarkan Prinsip Bela Negara**

Indonesia memiliki berbagai aturan yang berlaku, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, tentu harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Setiap warga negara juga diwajibkan untuk melakukan bela negara, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Selain itu, dalam usaha membela negara Indonesia, tentu membutuhkan pertahanan negara yang kuat untuk mempertahankan negara, maka dari itu TNI pun ikut serta sebagai salah satu bagian dari pertahanan utama mempertahankan negara Indonesia.

Beberapa pemimpin GKE telah menjelaskan bahwa, pekerjaan seorang TNI merupakan wujud dari usaha mempertahankan negara dan juga membela negara. Para

anggota TNI berada di bawah naungan lembaga pemerintahan di Indonesia, sehingga para pendeta GKE juga menyatakan penerimaannya karena anggota TNI melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada kesalahan dalam melakukan pekerjaannya, tentu ada hukum yang akan menegaskan dan akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan atau tingkat penyimpangan yang terjadi.

Pimpinan GKE dalam sikapnya terhadap anggota jemaat yang menjadi anggota GKE sesuai dengan pernyataan di atas, pastinya memberikan sikap yang baik dan menerima anggota jemaat menjadi anggota TNI. Para pemimpin GKE memandang bahwa anggotanya, akan dididik dengan baik supaya menjalankan tugas dengan baik pula. Pemimpin GKE juga dalam menjalankan setiap pelayanannya dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang ditetapkan, sehingga GKE pun sejalan dengan ketetapan negara Indonesia.

## **B. SARAN**

Pada bagian ini akan diberikan saran untuk memberikan sumbangsih dari penelitian yang dilakukan, yang sesuai dengan topik pembahasan mengenai anggota jemaat yang menjadi anggota TNI.

### **1. Bagi Masyarakat Barito Timur**

Penerapan dalam menjaga keamanan dan kedamaian di dalam ruang lingkup sosial sangatlah penting, sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik antara masyarakat, para anggota TNI dan anggota jemaat GKE dalam pelaksanaannya. Penting pula bahwa kejahatan marak terjadi, dibutuhkan kewaspadaan yang tinggi dan juga kesadaran untuk dapat mengurangi berbagai perbuatan yang menyimpang. Oleh sebab itu, belajar menghargai dan menghormati perbedaan yang ada sangatlah penting, dan bertindak dengan baik di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi sangatlah diperlakukan.

## **2. Bagi Pemerintah**

Pemerintah adalah sebagai bagian yang terpusat dari masyarakat. Pemerintah pun telah menetapkan berbagai peraturan dengan baik, sehingga dalam hal ini dibutuhkan pemerintah yang baik dan juga benar dalam memimpin, serta mengkoordinir setiap bagian dari pemerintahan dengan baik pula. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi lebih memikirkan kepentingan orang banyak, terutama kepentingan masyarakat. Pemerintah harus dapat bekerja sama dengan baik dengan masyarakat secara plural. Pemerintah pun perlu memperhatikan situasi dan kondisi dalam memberikan perintah untuk anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, agar TNI menjalankan tugas juga sesuai dengan keadaan yang terjadi, tidak bertindak semena-mena.

## **3. Bagi Gereja**

Gereja sebagai wujud dari pergerakan yang mengupayakan didikan rohani yang baik dan juga benar. Gereja juga harus lebih terbuka untuk melihat keadaan dunia, dengan tidak hanya memperhatikan permasalahan jemaat dalam ruang lingkup gereja saja, tapi perlu juga untuk memperhatikan permasalahan secara luas. Gereja harus selalu mengedepankan untuk mengusahakan damai, dan anggota jemaat yang menjadi anggota TNI pun dapat berbuah baik dari hasil didikan gereja dalam menjalankan tugas maupun kewajiban yang ada.

## **4. Bagi Upaya Berteologi di masa Kini**

Banyak hal yang memang harus dilihat dari sisi teologi, seperti menganalisis tindakan-tindakan manusia sesuai dengan pandangan Alkitabiah. Contohnya dalam hal ini menganalisis tindakan ‘kekerasan’ yang dilakukan oleh para anggota TNI dalam tugasnya, terutama dalam melakukan perang. Berteologi pada masa kini membutuhkan pemikiran atau pandangan yang lebih mendalam dalam menganalisis hal tersebut, tidak semata-mata melihat sisi buruknya saja tapi melihat hal yang benar yang dapat diambil. Berteologi juga perlu



untuk melihat situasi dan kondisi yang ada, agar dapat lebih menggali lebih dalam perihal sesuatu itu terjadi. Perlu juga untuk memperhatikan pandangan-pandangan dari pemikiran yang lain, tidak hanya mengacu kepada pemikiran sendiri, karena berteologi perlu memperhatikan banyak aspek atau faktor yang menyelimutinya.

### **C. KRITIK**

Pada bagian ini akan dipaparkan kritik terhadap kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari analisis hasil penelitian dan juga teori, sehingga dari hal-hal tersebut menghasilkan kritik yang memperlihatkan beberapa hal yang tidak begitu saja dapat diikuti. Jadi, kritik membuat tiap-tiap pembaca berpikir dan mengolah kembali apa yang telah diterima dari membaca tesis ini.

#### **1. Kritik Terhadap Sikap Selektivisme Pimpinan GKE**

Berdasarkan hasil penelitian, pimpinan GKE memiliki unsur selektivisme dalam pengambilan sikapnya, di mana para pemimpin GKE melegalkan perang dengan persyaratan bahwa perang dapat dilakukan asalkan sesuai situasi yang dibutuhkan, dan perang yang sesuai dengan ketetapan. Penulis dalam hal ini melihat berdasarkan dengan kelemahan dari sikap selektivisme bahwa masalah utamanya adalah ada pada pengambilan keputusan tentang siapa yang berhak untuk menetapkan perang yang adil. Ketika para pemimpin GKE mengambil sikap selektivisme maka mereka akan ikut menjadi hakim untuk melihat kebenaran secara sepihak. Hal seperti ini perlu untuk dipikirkan dan dirumuskan kembali agar para pemimpin GKE dapat mengambil keputusan yang tepat terhadap sikap yang dijalani selama ini, khususnya mengenai anggota jemaat GKE yang menjadi TNI.

## **2. Kritik Terhadap Sikap Pimpinan GKE berdasarkan Teologi Calvin tentang Gereja dan Negara**

Berdasarkan hasil penelitian, maupun tinjauan pustaka, pimpinan GKE mengikuti aliran Calvin atau Calvinisme, sehingga sebagian besar tata pelaksanaan GKE berjalan sesuai dengan pandangan atau doktrin dari Calvin. Sama halnya seperti Calvin, para pemimpin GKE menghargai segala bentuk pelaksanaan pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu sebagai wadah GKE berpijak. Namun, GKE kurang begitu menyadari, meskipun pemerintah dinyatakan melalui teologi Calvin yang berasal dari Allah, tapi pemerintah pun tidak mutlak benar di mata Allah. Hal ini dikarenakan, orang-orang yang tergabung dalam pemerintahan adalah orang-orang yang tentunya memiliki dosa. Para pemimpin GKE harus lebih bisa teliti atau memikirkan untuk menyatakan setuju terhadap pemerintah, karena hati nurani dan pikiranlah yang dapat menentukan kebaikan pemerintah yang sesuai dengan firman Allah.

## **3. Kritik Sikap Pimpinan GKE berdasarkan Prinsip Bela Negara**

Bela negara adalah merupakan panggilan bagi setiap warga negara untuk ikut berperan melindungi negara sesuai dengan UUD pasal 30 ayat 2 tahun 1945. Pendeta-pendeta GKE dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara juga mengikuti aturan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam tata gereja bahwa GKE dalam kehidupan bermasyarakat berazaskan Pancasila dan mengikuti aturan UUD 1945. Para pendeta GKE dalam hal ini dipengaruhi oleh konsep bela negara dengan ketundukannya terhadap undang-undang, artinya GKE melegalkan jemaatnya untuk berperan dalam mengikuti perang. Bela negara memiliki kelemahan sama halnya dengan selektivisme, karena itu penulis mengkritik sikap dari pendeta-pendeta GKE agar lebih tegas terhadap keputusan yang diambil, tentang konsep bela negara. Pendeta-pendeta GKE dalam hal ini boleh tunduk dengan negara tetapi tidak harus taat, maksudnya adalah agar para pendeta GKE dapat mengkaji kembali keputusan yang diambil negara apakah sudah benar dan sesuai, serta jangan sampai GKE mengambil

keputusan yang salah karena kepatuhan terhadap negara. Oleh karena itu, kritik ini dapat membuka ruang diskusi bagi para petinggi GKE agar dapat merumuskan tata gereja yang lebih spesifik tentang pembahasan mengenai aturan mengikuti peraturan undang-undang.

#### **D. REKOMENDASI**

Penelitian yang dilakukan tentu memiliki kekurangan dikarenakan keterbatasan waktu, lokasi, informan, dan juga faktor-faktor lainnya. Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar penelitian ini dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi, dan dapat memberikan sumbangsih yang lebih lagi bagi masyarakat, pemerintah, gereja maupun bagi perkembangan dalam lingkup akademik.

©UKDWN

## DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, J.L.Ch. *Bucer dan Calvin: Suatu Perbandingan Singkat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Anggito, Albi, Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anwar, Syaiful. 2016. *Melindungi Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aritonang, Jan S., Jonge, Chr. de. , 2009. *Apa dan Bagaimana Gereja? : Pengantar Sejarah Eklesiologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Azhari, Aidul Fitriadi. *Demokrasi dan Autokrasi : Gagasan, Model, Rekonstruksi*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Baskoro, Gembong. *Bela Negara di Kampus Berwawasan Internasional*. Resimen Mahasiswa dan IARMI: Swiss German University.
- Calvin, Yohanes. 2008. *Institutio : Pengajaran Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Calvin, Yohanes. 2009. *Institutio : Pengajaran Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Darmawijaya. 2006. *Kisah Para Rasul*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dister, Nico Syukur. 2004. *Teologi Sistematis 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Evangelis, Majelis Sinode Gereja Kalimantan. 2015. *Tata Gereja: Gereja Kalimantan Evangelis*. Banjarmasin: Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis.
- Fanani, Zaenal dan Bandonu, Adi. 2018. *Ketahanan Nasional, Regional, dan Global*. Malang: UMM Press.
- Geisler, Norman L. 2015. *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer—Edisi Kedua*. Malang: Literatur SAAT.
- Hall, David W. 2011. *Calvin Di Ranah Publik : Demokrasi Liberal, Hak Asasi, dan Kebebasan Sipil*. Surabaya: Momentum.
- Hall, David W., Peter A. Lillback. 2009. *Penuntun ke dalam Theologi Institutes Calvin: Esai-Esai dan Analisis*. Surabaya: Momentum.
- Handayani, Dyah Novieta. 2008. *Bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI AD)*. Jakarta: Erlangga.
- Haryatmoko. , 2011. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iskandar, Gatot Suroso, Idris. 2001. *Zakaria Kurir-Kurir Kemerdekaan (Kisah Nyata Para Pemuda Pembawa Berita Proklamasi 1945)*. Jakarta Timur: Balai Pustaka (Persero).

- Jonge, Christian de. 2008. *Apa Itu Calvinisme?*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Jonge, Chr. de dan Aritonang, Jan S. 2009. *Apa dan Bagaimana Gereja?: Pengantar Sejarah Eklesiologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Jurdi, Syarifuddin. 2016. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Konstestasi Ideolog dan Kepentingan*. Jakarta: Kencana.
- Leks, Stefan. 2003. *Tafsir Injil Lukas*. Yogyakarta: Kanisius.
- K, Septiawan Santana. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Karyadin, Ramiyanto. 2020. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahin, Marko, Rama Tulus. 2005. *70 Tahun Gereja Kalimantan Evangelis: Pergumulan dan Upaya GKE Menuju Kemandirian*. Banjarmasin: Majelis Sinode GKE.
- Mattox, John Mark. 2006. *Saint Augustine and the Theory of Just War*. New York: British Library Cataloguing-in-Publication Data.
- Newman, Barclay M. Philip C. Stine. 2008. *Pedoman Penafsiran Alkitab: Injil Matius*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Niftrik, G. C. Van dan Boland, B. J. 2008. *Dogmatika Masa Kini*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Oentoro, Jimmy. 2010. *Gereja Impian: Menjadi Gereja yang Berpengaruh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ranoh, Ayub. 2006. *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Singgih, Emanuel Gerrit. 2000. *Iman dan Politik dalam Era Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Singgih, Emanuel Gerrit. 2009. *Menguak Isolasi Menjalin Relasi: Teologi Kristen dan Tantangan Dunia Postmoder*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group,
- Sumaryono, E. 1995. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan*

- Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Toer, Pramoedya Ananta dkk. 1999. *Revolusi Indonesia Bagian I (1945)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Toer, Pramoedya Ananta, dkk. 2001. *Kronik Revolusi Indonesia Jilid III (1947)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ukur, Fridolin. 2002. *Tuaiannya Sungguh Banyak : Sejarah Gereja Kalimantan Evangelis Sejak Tahun 1835*. Jakarta: BPK Gunung Mulia,
- Wellem, F. D. 2006. *Kamus Sejarah Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Wellem, F.D. 2003. *Riwayat Hidup Singkat Tokoh-Tokoh dalam Sejarah Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Widjaja, Paulus S. 2008. *Engaging The State : A Study on Sixteenth Century Anabaptist View of the State*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.

#### **Sumber Internet:**

- <http://encyclopedia.usmmm.org/content/id/article/introduction-to-the-holocaust> Diakses Rabu, 25 Maret 2020)
- [https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175973/Perpres\\_Nomor\\_66\\_Tahun\\_2019.pdf](https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175973/Perpres_Nomor_66_Tahun_2019.pdf) Diunduh Senin, 12 Oktober 2020.
- <http://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/PERPANG-TRIDEK.pdf> Diunduh Rabu, 27 Maret 2019.

#### **Wawancara:**

- Wawancara dengan Pdt. Maria Ekasari M.Div, Ketua Resort GKE Awang, (Via telepon : 21 September 2019).
- Wawancara dengan Marko Mahin, *Pendeta GKE Palangka Raya*, (Palangka Raya: 23 Januari 2020).
- Wawancara dengan Messi Apidian, *Ketua Resort GKE Karusen Janang*, (Karusen Janang: 30 Januari 2020).
- Wawancara dengan Yanto. M. Mansur, *Ketua Resort GKE Bambulung*, (Bambulung: 30 Januari 2020).
- Wawancara dengan Wardiman S. Lidim, *Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis*, (Banjarmasin: 21 Januari 2020).
- Wawancara dengan Gunedi, *Ketua Resort GKE Tamiang Layang*, (Tamiang Layang: 28 Januari 2020).

Wawancara dengan Dwi Silvia Lauranteni, Pendeta di Resort GKE Awang, (Hayaping: 3 Februari 2020).

©UKDWW